



Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Boalemo (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo)

Adawiyah R. M. Bano^a, Harun Blongkod^b, Hartati Tuli^c

^{a b c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jenderal Sudirman No 6, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: adawiyahbano99@gmail.com^a, blongkod@ung.ac.id^b, hartati@ung.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 7 September 2022

Revised: 7 September 2022

Accepted: 18 September 2022

Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Keywords: *Quality of Financial Reports, Competence of Human Resources, Government Internal Control Systems, Utilization of Information Technology, Regional Financial Accounting Systems*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Boalemo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dengan populasi sebanyak 26 OPD dan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 4 pegawai disetiap OPD dengan total 104 pegawai. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa, 1) Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 3) Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 4) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Human Resource Competence, Government Internal Control Systems, Utilization of Information Technology, and Regional Financial Accounting Systems on the Quality of Financial Reports in Regional Apparatus Organizations (OPD) in Boalemo Regency. This study uses quantitative methods. This study uses primary data with a population of 26 OPD and the number of samples in this study is 4 employees in each OPD with a total of 104 employees. This study used a research instrument in the form of a questionnaire.

The data analysis technique in this research is using multiple regression analysis. The results of the study show that, 1) Human Resource Competence has no significant effect on the Quality of Financial Statements. 2) The Government's Internal Control System has a significant effect on the Quality of Financial Reports. 3) Utilization of Information Technology has a significant effect on the Quality of Financial Reports. 4) The Regional Financial Accounting System has no significant effect on the Quality of Financial Reports.

@2022 Adawiyah R.M. Bano, Harun Blongkod, hartati Tuli
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Tercapainya perekonomian yang baik dan untuk mengatur jalannya perekonomian negara maka peran pemerintah sangat dibutuhkan dan penting dalam hal ini. Dimana dengan adanya pemerintah maka diharapkan dapat menjadi alokasi sumber daya, peran sebagai regulator, kesejahteraan sosial, mengelolah ekonomi makro dan masih banyak lagi yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintahan Indonesia telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual diseluruh satuan kerja baik satuan kerja daerah maupun pusat, pengimplementasian ini dilakukan oleh pemerintah dengan harapan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kerja serta hasil kerja pemerintah.

Berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan (PP Nomor 71 Tahun 2010). Dalam hal tersebut jelas bahwa dalam suatu daerah dapat mengelola keuangannya sesuai dengan sistem akuntansi keuangan yang ada sehingga hasil akhir dari laporan keuangan suatu daerah dapat meningkat.

Sumber daya manusia dalam hal ini juga berperan penting untuk meningkatkan perekonomian baik pusat maupun daerah. Dalam hal meningkatkan ekonomi makro diharapkan agar laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan oleh masing-masing penanggung jawab akan menghasilkan laporan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami maupun transparansi karena berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan PP No 60 tahun 2008 pasal 6 mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah; a. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah; b. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan c. memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah (PP Nomor 60 Tahun 2008).

Husna (2017) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendekripsi penggelapan (fraud). Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Telaahan Atas LKPD Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo, 2018).

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Husna, 2017).

Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian dari prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisan, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Namun badan pemeriksa keuangan masih banyak menemukan kelemahan berkaitan dengan pengawasan pengendalian dalam pencatatan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah (Patra, Bustami & Hasriani, 2015)

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Agency Theory

Agency theory pertama kali diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang mengatakan bahwa teori keagenan merupakan teori ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Agency theory didalamnya terdapat hubungan agensi yang muncul ketika satu orang (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan jasa dan melimpahkan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Dalam pemerintahan yang demokrasi terdapat hubungan keagenan antara pemerintah sebagai penyedia informasi keuangan dan masyarakat sebagai pengguna informasi keuangan pemerintah. Akuntabilitas publik sebagai pemegang amanah (agen) mempunyai tugas untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segalah aktivitas dan kegiatannya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban (Mardiasmo, 2009) pada Indriani & Subardjo (2019).

Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Ramadhani et al., (2018) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: a.

relevan b. andal c. dapat dibandingkan d. dapat dipahami (PP Nomor 71 Tahun 2010).

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Handoko (2014:41) kompetensi yaitu bagaimana seseorang bekerja sama dengan memahami, memotivasi orang lain bagi individu atau kelompok. Setiap individu atau seseorang aparatur membutuhkan kompetensi ini agar dapat memperoleh partisipasi dan mengarahkan kelompoknya dalam pencapaian tujuan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan

Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan dilingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi: a. Lingkungan Pengendalian; Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. b. Penilaian Risiko; Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. c. Kegiatan Pengendalian; Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. d. Informasi dan Komunikasi; Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. e. Pemantauan Pengendalian Intern. Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti (PP Nomor 60 Tahun 2008).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Wardani & Andriyani (2017) indikator pemanfaatan teknologi informasi terdiri dari 5 yakni sebagai berikut: 1. Proses kerja secara elektronik, dimaksud untuk mengetahui apakah instansi memiliki komputer yang cukup dan apakah proses kerja sudah dilakukan secara elektronik. 2. Pengolahan dan penyimpanan data keuangan, dimaksud untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan data oleh instansi. 3. Pengolahan informasi dengan jaringan internet, dimaksud untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Informasi dengan memanfaatkan internet. 4. Sistem Manajemen, dimaksud untuk mengetahui infomasi yang dihasilkan memiliki integrasi. 5. Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer, dimaksud untuk mengetahui jadwal pemeliharaan barang elektronik, perbaikan pada peralatan yang rusak dan pengunaan antivirus pada komputer.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

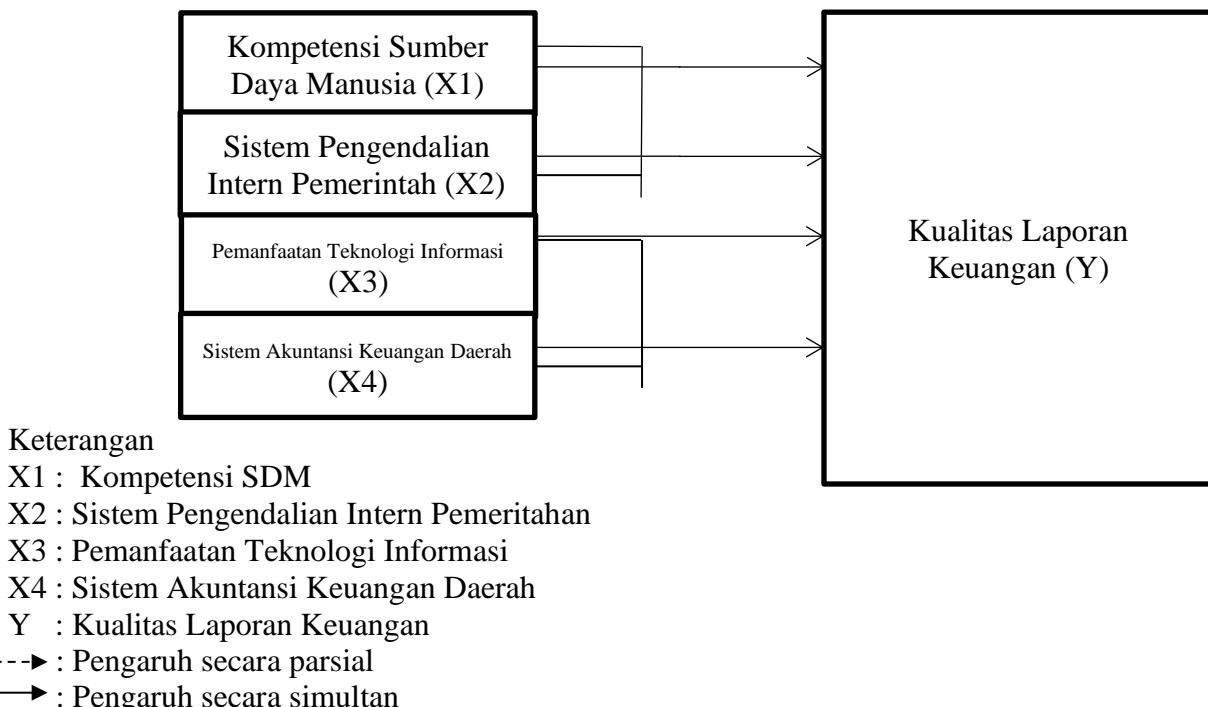
Halim (2012) dalam (Husna, 2017) juga berpendapat bahwa akuntansi pemerintah daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengukur hubungan antara variabel atau menganalisis bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Adapun desain penelitian untuk mengetahui hubungan dan pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Desain Penelitian



Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Boalemo, lokasi yang dipilih peneliti berdasarkan fenomena masalah yang ada di Kabupaten Boalemo terkait dengan Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Boalemo dan mudah untuk mendapatkan sumber data primer yang akurat. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari September Tahun 2021 sampai dengan selesai.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:148). Maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Boalemo berjumlah 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan mengambil responden dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Kepala Dinas/Badan, Sekretaris, bidang anggaran dan bendaara. Metode *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011).

Berdasarkan teknik *Purposive Sampling*, maka peneliti menetapkan kriteria

khusus yang dapat dijadikan sampel yaitu perangkat daerah disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut:

- a) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang memiliki kemampuan atau kapabilitas yang baik dalam hal pembuatan laporan keuangan.
- b) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat langsung dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pengawasan pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di setiap organisasi perangkat daerah.
- c) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi sampel penelitian ini adalah pimpinan/pejabat, sekretaris, dan ASN yang bekerja pada bagian keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

- a) Observasi

Pada teknik ini peneliti menggunakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang real yang dilaksanakan sebelum melaksanakan penulisan penelitian.

- b) Angket

Pada teknik pengumpulan data ini peneliti menyusun angket/kuisisioner berdasarkan indikator-indikator yang digunakan pada variabel yang diteliti kemudian membagikan kepada responden dalam bentuk google form melalui aplikasi whatsapp. Guna mendapatkan hasil secara langsung dari yang bersangkutan yang menjadi responden penelitian peneliti juga membagikan angket/kuesioner tersebut dengan membantu langsung responden dalam menggunakan/mengisi google form karena rata-rata responden belum memahami penggunaan google form.

- c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan ini berupa gambar yang menjadi bukti bahwa peneliti melakukan penelitian pada objek tersebut.

Operasional Variabel

Variabel dependen yang dijadikan objek penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan (Y). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, informasi laporan keuangan dikatakan berkualitas dan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai (PP Nomor 71 Tahun2010). Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Variabel independen yang dijadikan objek penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1). Menurut Spencer and Spencer (1993 ; 9) Kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan kinerja unggul didalam pekerjaan atau situasi. Disamping itu menurut Boyatzis(1982) Kompetensi didefinisikan sebagai kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai

hasil yang diharapkan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (X2). Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh pegawai yang dilakukan bukan hanya bersifat insidental dan responsif atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus-menerus. Sistem pengendalian internal memberikan jaminan yang memadai, bukan jaminan absolut karena sangat sulit untuk membangun sistem yang sempurna. Di samping itu, Sistem Pengendalian Internal masih mengandung kelemahan dan keterbatasan sehingga masih memungkinkan untuk diterobos, dilanggar, dan dilakukan kesalahan. Sistem Pengendalian Internal bukanlah sesuatu yang final, tetapi harus selalu diriviu, dievaluasi, diuji, dikembangkan, dan diperbaiki Mahmudi dalam (Pavitasari, 2018).

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3). Menurut Husna (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X4). Menurut Husna (2017) Permendagri No. 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisan, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner/angket yang dibagikan kepada responden dalam bentuk google form. Kuesioner/angket adalah instrumen untuk memperoleh data dengan cara memberikan daftar pertanyaan dalam bentuk file print out/ketas yang akan diisi oleh responden yang ditetapkan sebagai sampel penelitian sedangkan google form adalah instrumen yang sama dengan memberikan daftar pertanyaan tapi dalam bentuk softfile/link yang dibagikan melalui aplikasi whatsapp/langsung diketik dan cara menjawabnya dilakukan dengan menggunakan handphone, komputer, atau laptop. Dalam penelitian ini kuesioner yang digunakan merupakan indikator-indikator dari penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa distribusi penelitian tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov Test dalam aplikasi SPSS. Berikut ini hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov.

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		104
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,92171707
Most Extreme Differences	Absolute	,171
	Positive	,073
	Negative	-,171
Test Statistic		,171
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Olah Data, 2021 (SPSS Versi 22)

Bersadarkan hasil output pengolahan data uji normalitas dengan menggunakan rumus kolmogorov-smirnov Test sebagaimana tertera pada tabel 4.20, maka dapat diperoleh bahwa nilai Asymp.sig. (2-tailed) untuk variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1), sistem pengendalian intern pemerintahan (X_2), manfaat teknologi informasi (X_3), sistem akuntansi keuangan daerah (X_4) dan kualitas laporan keuangan (Y) adalah 0,200 lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$) sehingga databerdistribusi normal.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial atau secara individu antara Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1), Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (X_2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_4), dan Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hasil pengujiannya sebagai berikut.

**Tabel 2 Hasil Uji t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Ket
	B	Std. Error			
1(Constant)	6,741	3,515	1,918	,058	
KSDM (X_1)	,187	,144	1,299	,197	Hipotesis ditolak
SPIP (X_2)	,318	,148	2,144	,034	Hipotesis Diterima
PTI (X_3)	,252	,126	2,008	,047	Hipotesis Diterima
SAKD (X_4)	,182	,161	1,133	,260	Hipotesis Ditolak

Sumber data diolah 2021, SPSS versi 22

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat T-tabel yang diperoleh setiap variabel. Untuk mendapatkan simpulan apakah menerima atau menolak H_0 , terlebih dahulu harus ditentukan nilai t tabel yang akan digunakan. Nilai t tabel ini bergantung pada besarnya df (degree of freedom) serta tingkat signifikansi yang digunakan. Denganmenggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% dengan persamaan sebagai berikut:

$$t_{\text{tabel}} = n - k - 1: \alpha/2$$

$t_{tabel} = 104 - 4 - 1 : 0,05$

$t_{tabel} = 99 : 0,025$

$t_{tabel} = 1,984$

Hasil pengujian pengaruh setiap variabel bebas (kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem akuntansi keuangan daerah) terhadap variabel terikat yakni kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Boalemo.

3. Uji Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui secara keseluruhan dalam penelitian ini. Uji f (uji simultan) digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan atau bersama-sama variabel Kompetensi SDM (X1), Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X4) terhadap Kualitas Laporan Keungan (Y). Kriteria pengujian simultan yaitu jika F hitung $< F$ tabel maka tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika F hitung $> F$ tabel maka ada pengaruh secara simultan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil pengujinya sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1136,863	4	284,216	32,001	,000 ^b
Residual	879,252	99	8,881		
Total	2016,115	103			

a. Dependent Variable: KLK(Y)

b. Predictors: (Constant), SAKD(X4), KSDM(X1), PTI(X3), SPIP(X2)

Dari tabel 3 menunjukkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar $32.001 > F$ tabel (2.46) dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 sehingga > 0.05 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi sumber daya manusia(X1), Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3), dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

4. Koefisien Determinasi (R Square)

Analisis koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil analisis koefisien determinasi.

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,751 ^a	,564	,546	2,98016

a. Predictors: (Constant), SAKD (X4), KSDM (X1), PTI (X3), SPIP

(X2)

b. Dependent Variable: KLK (Y)

Sumber : Olah Data, 2021 (SPSS Versi 22)

Pada Tabel 4 menunjukkan nilai R square sebesar 0.564 atau 56.40% hal ini menunjukkan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi sumber daya manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 56.40% sedangkan sisanya sebesar 44.20% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti variabel pemahaman basis akrual, kinerja karyawan, komitmen organisasi, efektivitas penerapan SAP dan pengawasan keuangan daerah.

Pembahasan

a) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD di Kabupaten Boalemo

Berdasarkan tabel uji t dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Boalemo. Berdasarkan bukti empiris dari penyebaran kuesioner pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Boalemo menunjukkan kompetensi sumber daya manusia ditinjau dari indikator kemampuan pada bidang yang diemban dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan peningkatan keterampilan bagi pegawai terlaksana dengan sangat baik/sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Boalemo yang memiliki kemampuan dibidangnya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan jika ada peraturan baru tentang keuangan daerah pegawai pada bagian keuangan/akuntansi mendapat sosialisasi atau diklat.

Namun pada bukti lapangan diketahui dalam pelaksanaan penelitian PEMDA Kabupaten Boalemo sedang melakukan perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) antar instansi (Mutasi) serta Rolling Staf. Setelah melakukan uji statistik dan melihat hasil statistik deskriptif dilihat dari tingkat pendidikan pegawai pada bidang keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Boalemo banyak lulusan SMA/SMK/MA.

Kompetensi sumber daya manusia yang mengelola keuangan dalam melaksanakan proses akuntansi seharusnya mengikuti peraturan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan keuangan negara dan peraturan perbendaharaan negara, dan apabila tidak diikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku maka dapat menghambat dalam pembuatan dan proses penyusunan laporan keuangan.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD di Kabupaten Boalemo

Berdasarkan tabel uji t dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Boalemo. Berdasarkan bukti empiris dari penyebaran kuesioner pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Boalemo menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintahan ditinjau dari indikator komitmen pegawai dalam menetapkan aturan serta evaluasi kekurangan pengendalian internal terlaksana dengan sangat baik/sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Boalemo menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai serta selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/review dan saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat.

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD di Kabupaten Boalemo

Berdasarkan table uji t dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Boalemo. Berdasarkan bukti empiris dari penyebaran kuesioner pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Boalemo menunjukkan dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dilihat dari indikator pengiriman informasi dengan menggunakan jaringan internet dan pengelolahan informasi dengan jaringan internet sangat baik/sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan jaringan internet dimanfaatkan pada unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Boalemo memiliki jaringan internet yang membantu terjalannya aktivitas pengelolaan informasi.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pasal 17 ayat 1,2, dan 3 disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik (Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010).

4. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD di Kabupaten Boalemo

Berdasarkan table uji t dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Boalemo. Berdasarkan bukti empiris dari penyebaran kuesioner pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Boalemo menunjukkan sistem akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Boalemo terlaksana dengan sangat baik/sangat tinggi menjadi perhatian utama dilihat dari indikator penerimaan kas dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur serta peraturan yang ada serta penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang dapat dikelola dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan responden memberikan jawaban (tanggapan) yang besar terhadap pernyataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Boalemo melakukan penerimaan kas sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dan setiap transaksi keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di dukung oleh bukti transaksi.

Adapun sistem akuntansi keuangan daerah yang dilihat dari indikator dalam penafsiran/interpretasi sangat baik/sangat tinggi lainnya yaitu indicator instansi mengusulkan aset yang layak untuk dihapus dan melakukan pencatatan serta indikator dalam mengkoreksi pencatatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini dibuktikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Boalemo melakukan pencatatan/inventarisasi untuk perlengkapan bukti kepemilikan serta pemasangan label kode barang milik daerah serta dalam pencatatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selalu mengoreksi kesalahan dalam pencatatan dan pengakuan aset serta utang piutang. Namun hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Diketahui dalam pelaksanaan penelitian PEMDA Kabupaten Boalemo sedang melakukan perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) antar instansi (Mutasi) serta Rolling Staf sehingga beberapa responden yang baru dimutasi atau dirolling dibagikan kuesioner belum memahami situasi instansi dengan pernyataan-pernyataan yang ada pada kuesioner. Beberapa asumsi lain yang membuat sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan dilihat dari cara responden dalam menanggapi pernyataan-pernyataan pada kuesioner yang diberikan, asal mengisi karena malas membaca pernyataan-pernyataan pada kuesioner, atau ikut-ikutan mengisi pilihan pernyataan dengan responden lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Boalemo. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan penelitian sebagai berikut:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Boalemo. Hal ini terjadi karena masih banyaknya pegawai yang belum memenuhi kriteria sesuai indikator.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Boalemo. Makna dari koefisien positif menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintahan maka kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Boalemo akan semakin optimal.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Boalemo. Makna dari koefisien positif menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Boalemo akan lebih baik.
4. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

di Kabupaten Boalemo. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil analisis rasio Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang hasilnya kurang optimal.

5. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif namun tidak signifikan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak perpengaruh positif signifikan artinya Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Boalemo secara menyeluruh belum berjalan dengan baik dan belum memberikan kualitas laporan keuangan yang optimal.

Saran

Adapun saran yang diberikan penulis meliputi 2 aspek, yakni saran teoritis dan saran praktis. Dalam saran teoritis penulis memberikan saran untuk lebih banyak membaca buku yang akan menjadi referensi, supaya lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah kualitas laporan keuangan. Saran dalam aspek praktis yaitu yang peneliti harapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak terkait:

1. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Boalemo disarankan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas dengan memberikan apresiasi atau penghargaan dan insentif kepada pegawai yang telah melaksanakan tugas dengan baik sehingga lebih mendorong pengembangan kinerja dan memotivasi seluruh pegawai.
2. Perlunya bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Boalemo memperhatikan kemandirian pegawai menggunakan logika dalam menganalisis laporan keuangan melalui arahan dari pimpinan agar pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan dan tidak ada keinginan dalam melakukan penyimpangan karena seringnya pegawai dalam menggunakan logika akuntansi daripada mengikuti permendagri.
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah dengan melakukan analisis risiko secara lengkap dengan peningkatan implementasi atau penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilaksanakan oleh pimpinan serta seluruh pegawai agar segala kegiatan yang dilaksanakan dapat diawasi dan diarahkan sehingga tidak menyimpang dari prosedur dan standar yang telah ditetapkan terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan.
4. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Boalemo dapat terus meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat terus berkualitas dalam menciptakan pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.
5. Pemanfaatan teknologi informasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Boalemo disarankan untuk meningkatkan pemeriksaan rutin pada perangkat komputer dengan menjadwalkan pemeriksaan komputer pada ahli atau pada seseorang yang benar-benar memahami perawatan perangkat

- komputer sehingga tidak membuat kesalahan ketika melaksanakan pemeriksaan rutin seperti terformatnya seluruh file penting pada komputer.
6. Pada pemanfaatan teknologi informasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Boalemo juga perlu melakukan pemeliharaan pada perangkat komputer bukan hanya pemeliharaan pada perangkat keras (hardware) tetapi juga perangkat lunak (software) yang sering membuat komputer menjadi lambat sehingga tidak menghalangi pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan dapat memanfaatkan dengan baik fasilitas komputer yang telah disediakan oleh pemerintah
 7. Bagi Pemerintah Kabupaten Boalemo disarankan untuk menerapkan sepenuhnya sistem akuntansi keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga mendapatkan hasil laporan keuangan yang berkualitas dan optimal.
 8. Pada sistem akuntansi keuangan daerah harus memperhatikan keseluruhan prosedur bukan hanyapemasangan label kode barang milik daerah atau dalam pencatatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selalu mengoreksi kesalahan dalam pencatatan dan pengakuan aset serta utang piutang, dimana pemerintah Kabupaten Boalemo perlu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang harus disajikan secara detail dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta di lapangan.
 9. Pada peneliti selanjutnya disarankan jika ingin melakukan penelitian yang sama pada Kabupaten Boalemo lebih memperhatikan pada variabel (X_4) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah agar meningkatkan hasil Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Boalemo karena nilainya sangat kecil pada hasil analisis yang dilakukan yaitu sebesar 0.132.
 10. Pada hasil koefesien determinasi dijelaskan bahwa penelitian ini memperoleh sebesar 56.40% dalam kategori sedang, sedangkan sisanya sebesar 44.20% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Untuk itu peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor lain yang berkaitan dengan Kualitas Laporan Keuangan seperti variabel Pemahaman Basis Akrual, Kinerja Karyawan, Komitmen Organisasi, Efektivitas Penerapan SAP, dan Pengawasan Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Handoko, Hani, T. (2014). *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia* (Kedua). BPF.

Husna, T. N. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Peran Inspektorat terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Pekanbaru. *JOM Fekon*, 53(9), 2835–2849.

Indriani, M. R., & Subardjo, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(1).

Patra, A. D. A., Bustami, L., & Hasriani. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 02(2), 1–9.

Pavitasari, E. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. 3(2).

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010. (2010). <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/2461/4/TFLACSO-2010ZVNBA.pdf>

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (2010). 1–413. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem *Pengendalian Intern Pemerintah*. (n.d.).

Ramadhani, M., Soerono, A. N., & Mulyasari, W. (2018). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, dan Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12, 40–63. <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5244>

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, cv.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. ALFABETA, cv.

Telaahan atas LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. (2018).

Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>